

## TAJUK RENCANA

### Kabupaten/Kota Layak Anak

**PERINGATAN** Hari Anak Nasional (HAN) Selasa 23 Juli lalu mengingatkan kita semua mengenai pemenuhan hak-hak anak. Apakah selama ini hak-hak mereka sudah kita penuhi secara baik atau belum, khususnya di area-area publik ataupun di layanan-layanan umum? Juga mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai hal. Kalau belum tentu saja pertanyaan berikutnya adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan semua itu.

Pemerintah sebenarnya sudah mendorong kita semua untuk bisa memenuhi hak-hak anak. Antara lain melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan berpedoman Permen ini, mestinya para Bupati/Walikota bersama seluruh jajaran berupaya menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Yogyakarta tampaknya sudah berupaya ke arah itu. Seperti diberitakan koran ini, Kamis (25/7), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta tengah mendorong keberadaan hotel ramah anak agar tumbuh dan berkembang di Kota ini. Selain untuk mewujudkan KLA, tentu saja untuk semakin memperkuat predikat sebagai kota wisata. Dalam hal ini, hotel sebagai akomodasi pariwisata juga menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permen di atas, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kemudian yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkem-

bang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Jadi, aspek untuk mewujudkan KLA sangat banyak. Akomodasi hotel ramah anak hanya salah satunya. Lingkungan lembaga-lembaga pendidikan juga penting untuk memperhatikan masalah ini, mulai TK/PAUD, SD, SMP dan SLTA. Apalagi perundungan atau *bullying* masih sering terjadi lingkungan sekolah. Juga masih sering terdengar info terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Perundungan atau *bullying* adalah perlakuan menyakitkan seseorang dengan melakukan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis secara sengaja. Perundungan dilakukan oleh sekelompok orang atau individu kepada lainnya yang dapat menyebabkan trauma kepada korban perundungan. *Bullying* bagai mimpi buruk bagi sebagian anak-anak. Mimpi ini menghasilkan dampak buruk untuk kesehatan mental, bahkan fisik bagi anak-anak. Itu hanya salah satu contoh suasana yang tidak ramah anak. Membuat anak tidak nyaman. Masih banyak hal-hal yang semuanya harus kita hindari bahkan kita hilangkan dari lingkungan anak.

Pendek kata, kita dan semua stakeholders terkait harus bersama-sama berupaya menciptakan KLA. Hal ini juga demi anak-anak kita dan demi masa depan mereka. Mari kita ciptakan masa depan anak-anak yang cerah sehingga mereka menjadi generasi emas yang berkualitas. □

## Jl Bubar, Kewaspadaan Tak Boleh Ambyar

**KELOMPOK** Jamaah Islamiyah (JI) telah menyatakan diri bubar dan berjanji tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Namun dengan bubarnya JI, tidak serta merta membuat ancaman akan ekstremisme berbasis kekerasan lekang begitu saja. Butuh kolaborasi dari semua pihak, untuk bersama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, agar tidak memperluas jaringan hingga memakan korban.

Bubarnya organisasi JI disampaikan pada 30 Juni 2024 lalu oleh 16 tokoh pimpinan kelompok tersebut. Dalam perhelatan dimaksud, Abu Rusdan, mantan pemimpin JI menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan NKRI. Ia menjamin kurikulum dan materi ajar bebas dari sikap tatharruf dan merujuk pada paham Ahlulsunah wal Jamaah, seraya membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. Rusdan juga menyatakan siap terlibat aktif dalam mengisi kemerdekaan, agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermanfaat. Pentolan JI ini menegaskan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsisten menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

Deklarasi pembubaran JI menandai babak baru dalam dinamika kelompok radikal ini, namun kita harus memahami bahwa bagi para pengikutnya, pembubaran organisasi tak serta-merta berarti meninggalkan ideologi. Sel-sel ideologinya tentu telah menyebar ke berbagai penjuru negeri. Kita juga perlu waspada akan hadirnya kelompok sempalan di kemudian hari.

**Dinamika Tren Ekstremisme**  
Keberadaan kelompok ekstrem tak dapat dipungkiri masih eksis di sekitar kita dan mengalami dinamika menyesuaikan tantangan dan peluang yang ada. Faktor yang mempengaruhi antara lain: evolusi teknologi, perubahan dalam taktik dan strategi, serta respons kebijakan dari pemerintah dan komunitas internasional.

### Nunung Dwi Nugroho

Secara umum, fenomena ekstremisme berbasis kekerasan mengalami dinamika yang signifikan, yakni dengan upaya (1) transformasi digital: propaganda *online* di media sosial dan website, rekrutmen serta radikalisasi melalui konten digital; (2) menjalin kemitraan: melakukan infiltrasi ke dalam organisasi politik formal, terlibat



KR-JOKO SANTOSO

dalam bisnis legal untuk membiayai organisasi, memanfaatkan organisasi amal sebagai kedok kegiatan dan membentuk jaringan internasional; (3) asimilasi: menyusup dalam lembaga pemerintah dan institusi pendidikan, serta radikalisasi di lembaga masyarakat.

### Urgensi Pendekatan Inovatif dan Kolaboratif

Sikap JI kembali ke pangkuan NKRI memang patut diapresiasi. Tetapi hal itu tidak seraya mematahkan ketahanan sosial dan daya kritis kita untuk tetap waspada dalam melawan setiap sel radikalisme di sekitar kita. Dinamika tren baru dalam ekstremisme kekerasan mencerminkan kompleksitas dan adaptasi berkelanjutan oleh kelompok radikal, sehingga memunculkan kebutuhan akan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif dalam menanggulangi ancaman ini.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang tercermin melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Kebijakan ini merupakan langkah nyata penerapan pendekatan *whole-of-government and whole-of-society* yang mengedepankan keterlibatan semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat.

Momentum bubarnya JI tidak boleh menjadikan kita lengah, karena potensi radikalisme masih ada di sekitar kita, misal dengan masih maraknya ujaran kebencian dan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas tertentu, sehingga kita harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Hal yang dapat kita lakukan antara lain dengan tidak meneruskan pesan bernuansa provokatif di media sosial, menanamkan rasa cinta tanah air dalam keluarga, mengenali potensi radikalisme di lingkungan seraya optimalisasi peran Jaga Warga, menghargai entitas, budaya dan agama yang berlainan, serta terlibat dalam kegiatan penyebaran nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya.

Kita juga harus selalu menerapkan nilai-nilai lokal yang dikenal sebagai *hashtalaku* dalam kehidupan sehari-hari yakni gotong royong, guyub rukun, *grapyak semanak, lembah manah, ewuh pakewuh, pangerten, andhap asor, dan tepa selira*. □

\*) **Nunung Dwi Nugroho**,  
Analisis Ketahanan Budaya pada  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
DIY; Mahasiswa S3 Sosiologi,  
Fisipol UGM.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Pengentasan Kemiskinan Melalui Desa Prima

**KEMISKINAN** berwujud perempuan. Istilah ini digulirkan oleh feminis yang menyadari bahwa dalam lingkaran kemiskinan, perempuan menjadi yang termiskin. Perempuan dan anak menderita kekurangan gizi, paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, terbatas akses pendidikan, tunjangan sosial dan lapangan pekerjaan (Todari, 2000).

Namun perempuan juga berdaya untuk membuat perubahan. Masa pandemi, resiliensi perempuan menyelamatkan keluarga dari ancaman kelaparan. Laporan IMF (2018) menemukan bahwa perempuan bekerja, maka ekonomi tumbuh lebih cepat. Pemberdayaan ekonomi perempuan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan sebesar USD 7 triliun pada perekonomian global.

Desa Prima digulirkan oleh Pemerintah Daerah DIY sebagai program pemberdayaan perempuan melalui pintu masuk ekonomi. Desa Prima digagas untuk tujuan peningkatan pendapatan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Ekonomi menjadi penguat posisi tawar perempuan. Skemanya melalui pembentukan kelompok dan pemberian hibah dari APBD DIY untuk modal usaha melalui mekanisme simpan pinjam oleh kelompok. Modal ini bergulir dan mampu meningkatkan pendapatan hingga dua juta perbulan (DP3AP2 DIY, 2021). Saat ini terdapat 157 Desa Prima dengan keanggotaan antara dua puluh lima orang hingga delapan puluh orang dengan dana yang dikelola hingga ratusan juta rupiah.

Program ini menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Gubernur DIY. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di DIY tinggi, namun trendnya menurun tiap tahun seperti dari 11,04% menjadi 10,83% pada tahun ini. Strategi pengentasan kemiskinan adalah membidik target pengembangan usaha dengan tujuan melindungi keluarga dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

### Peran Kalurahan dan Dana Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

### Rofiqoh Widiastuti

2014 Tentang Desa mengamanatkan masyarakat desa berdaulat dalam mengelola pembangunan. Sementara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa, terutama nomor lima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Pemerintah DIY kemudian membangun strategi pengembangan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Prima yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Jika dukungan semula fokus pada modal simpan pinjam, selanjutnya dibuat usaha bersama kelompok dan mendapatkan dukungan anggaran bagi produksi yang dilakukan. Produk disesuaikan dengan potensi dan kesepakan kelompok sebagai wujud dari kerja pemberdayaan dimana BKK ini dikelola oleh Desa Prima dan melibatkan peran kalurahan.

Maka munculah produk bolu kelapa Desa Prima Kalurahan Putat Pathuk Gunungkidul yang saat ini memproduksi ribuan bolu kelapa dengan omset kurang lebih dua ratus lima puluh juta rupiah tiap bulan. Produksi ini juga melibatkan tenaga kerja di luar kelompok dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Bahan kelapa dan telur dari petani Putat, sementara bahan terigu, gula, minyak dan lainnya diambil di warung Putat dalam bentuk kemitraan.

Pada tahun 2024 juga dikembangkan BKK di beberapa wilayah seperti Kalurahan Karang Sari Pengasih Kulonprogo dengan *bakery* untuk memenuhi pasar roti dan *snack*. Kemudian di Kalurahan Ngargosari Samigaluh dikembangkan olahan pisang. Di Gunungkidul tepatnya di Kalurahan Planjan Saptosari, BKK Desa Prima untuk usaha kerajinan tembaga.

### Posisi Tawar Naik

BKK Desa Prima melalui Dana Keistimewaan ini tujuannya tidak semata ekonomi, na-

mun luas pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY tahun 2023 sebesar 94,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup, akses terhadap pendidikan, dan nilai pendapatan perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yaitu 0,143 di mana terdapat kesenjangan bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Untuk aspek kehidupan ekonomi dan politik, kesenjangan lebih besar.

Pada sisi inilah ekonomi menjadi penentu posisi tawar dan keberdayaan perempuan. Keterlibatan perempuan akan sangat diperhitungkan untuk memperbaiki pembangunan. Isu kemiskinan bersisian dengan isu lainnya seperti stunting, pinjaman online (pinjol), perdagangan manusia, dan eksploitasi sumberdaya alam. Perempuan dan anak adalah yang paling terdampak namun perempuan adalah subyek yang berperan signifikan. □

\*) **Rofiqoh Widiastuti**, Dinas  
Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk DIY.

## Pojok KR

Soal sampah, Pemda DIY tagih kabupaten/kota.

-- **Harus segera tertangani dengan baik.**

\*\*\*

Peningkatan aktivitas Merapi masih aman.

-- **Namun kewaspadaan tak boleh hilang.**

\*\*\*

Komisi X ingatkan percepat sertifikasi guru.

-- **Jangan sampai terjadi 'krisis guru'.**

*Beraksi*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
**Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi.

**Komisaris Utama:** Prof/Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.

**Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU**

**Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107,2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karanglesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- W wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.